

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemberian otonomi daerah memberikan keleluasaan kepala daerah untuk mengelola keuangan daerahnya, sehingga pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban dalam penggunaan dan pengelolaan sumber dana keuangannya. Namun dengan adanya pemberian keleluasaan ini, pemerintah daerah tidak dapat sekehendaknya dalam penggunaan sumber dana keuangan tersebut karena pada hakikatnya sumber dana yang telah dipakai harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

Tata keuangan atau proses akuntansi telah banyak berkembang seiring kemajuan sistem keuangan modern. Namun masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah daerah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan masih terdapat banyak penyimpangan yang telah berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan selalu mengutamakan transparansi dan peningkatan akuntabilitas pada instansi pemerintahan sehingga institusi-institusi pemerintah harus selalu memperbaiki kualitas kinerja keuangannya (Mahaputra dan Putra, 2014).

Pemerintah daerah memang memiliki kewajiban untuk mempublikasikan informasi dalam bentuk laporan keuangan sebagai dasar dalam pengambilan

keputusan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memuat informasi harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai, oleh karena itu laporan keuangan pemerintah daerah yang memuat informasi akuntansi harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yakni, 1) Relevan , 2) Andal , 3) Dapat Dibandingkan, dan 4) Konsisten. Apabila informasi yang terdapat didalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah , berarti pemerintah daerah harus mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, jika tidak memenuhi maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifitan (Surastiani dan Handayani, 2015).

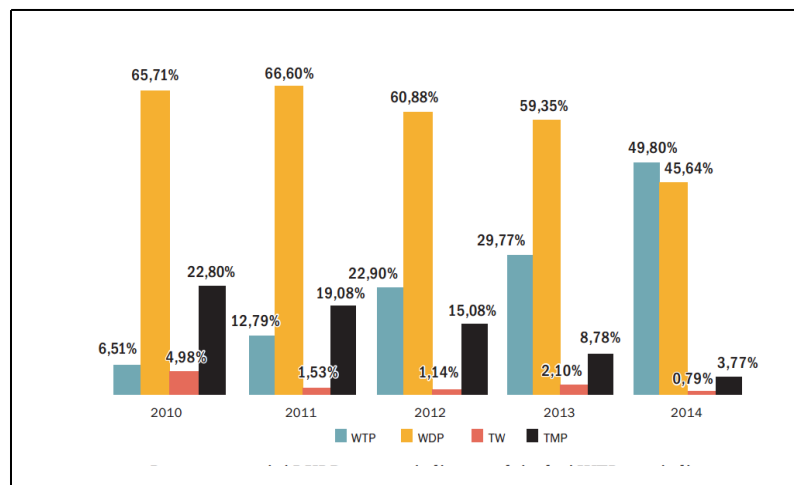
Tujuan pemberlakuan peraturan tersebut adalah diharapkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah lebih *accountable* dan mengalami peningkatan kualitasnya. Kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut dipengaruhi oleh faktor kualitas sumberdaya manusia, sistem pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan untuk pengelolaan keuangan suatu daerah diperlukan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun kenyataannya laporan keuangan pemerintah daerah masih jauh dari harapan. Hal ini ditunjukkan berdasarkan data dari IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester) yang dikeluarkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

untuk semester I tahun 2015, perkembangan opini yang diterima dari LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan hasil sebagai berikut:

Gambar 1.1

Grafik Perkembangan Opini LKPD



Sumber: www.bpk.go.id (IHPS I 2015)

- Keterangan :
- Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
 - Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
 - Tidak Wajar (TW)
 - Tidak Memberi Pendapat (TMP)

Dari grafik 1.1 dapat kita lihat bahwa persentase LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2014 sebanyak 49,80%, meningkat 20,03% dari tahun 2013 sebanyak 29,77%. Persentase LKPD yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2014 adalah sebanyak 45,64%, turun 13,71% dari tahun 2013 sebanyak 59,35%. Persentase LKPD yang memperoleh opini Tidak Wajar (TW) tahun 2014 adalah sebanyak 0,79%, turun 1,31% dari tahun 2013

sebanyak 2,10%. Persentase LKPD yang memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun 2014 adalah sebanyak 3,77%, turun 5,01% dari tahun 2013 sebanyak 8,78%.

Hasil evaluasi oleh BPK tahun 2015 menunjukkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh opini WTP dan opini WDP pada kenyataannya sudah memiliki sistem pengendalian intern yang sudah memadai. Namun tidak sedikit pula opini yang didapat oleh suatu entitas adalah opini TW dan TMP. Hal ini terjadi karena masih kurangnya sistem pengendalian intern dan memerlukan perbaikan atas pengendalian intern dalam hal kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK menemukan beberapa permasalahan utama sistem pengendalian intern yaitu 1) proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, 2) pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat, 3) penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, 4) perencanaan kegiatan tidak memadai, 5) penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan dan 6) sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai. Mahaputra dan Putra (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Gianyar. Hal ini didukung oleh Ningsih (2014) yang meneliti sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Tanah Datar.

Faktor kedua selain lemahnya sistem pengendalian intern adalah kualitas sumber daya manusia. Untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan SDM yang juga berkualitas dalam upaya peningkatan SDM. Menurut Harifan (2009) sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. SDM merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut.

Surastiani dan Handayani (2015) mengungkapkan bahwa kualitas SDM mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi kualitas sumberdaya manusia maka kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik. Sumber daya manusia yang paham akan akuntansi pemerintah dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan untuk dapat menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Sementara itu masih banyaknya hambatan mengenai kualitas sumberdaya manusia itu sendiri dan implementasinya. Mungkin kurangnya pelatihan dalam proses pengembangan pengetahuan yang diberikan kepada para pegawai, pemberian materi dalam seminar-seminar tentang tata pengelolaan keuangan pemerintah yang telah banyak mengalami perubahan.

Faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan teknologi

informasi telah banyak digunakan diberbagai instansi pemerintah karena dapat dengan mudah membantu dalam proses pembuatan laporan keuangan. Pengelolaan data menjadi suatu informasi dengan bantuan komputer akan lebih meningkatkan nilai dari informasi yang dihasilkan (Wahana Komputer, 2003). Dalam hubungannya dengan sistem informasi akuntansi, komputer akan meningkatkan kapabilitas sistem. Ketika suatu perangkat komputer telah dihubungkan dengan teknologi informasi maka informasi tersebut dipindahkan kedalam sistem informasi akuntansi, tidak ada kegiatas umum yang ditambah atau bahkan dikurangi. Sistem informasi akuntansi masih mengumpulkan , memproses , dan menyimpan data. Sistem masih harus memasukkan pengendalian informasi atas keaslian data. Sistem juga akan menghasilkan laporan dan informasi lainnya. Hanya saja pengkomputerisasian atas sistem informasi akuntansi ini dapat mengubah karakter suatu aktivitas . Output yang dihasilkan lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak (Trisaputra, 2013). Ningsih (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas informasi LKPD. Bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka kualitas informasi laporan keuangan akan semakin tinggi.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi untuk mendukung pembuatan laporan keuangan. Kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang ini digunakan oleh suatu entitas untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah dan dalam proses pendistribusian informasi keuangan kepada

suatu pelayanan publik. Dengan semakin berkembangnya suatu kemajuan teknologi informasi serta tidak menutup kemungkinan bahwa pemanfaatannya pun semakin luas, hal ini akan membuka peluang bagi pelayanan publik dengan mudah dapat mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah sesuai dengan kebutuhannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Arfianti (2011) menunjukkan bahwa kesiapan aparatur daerah dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih sangat kurang, terlihat dari suatu sarana prasarana seperti komputer baik perangkat *hardware* maupun *software*. Hal inilah yang mungkin menjadi kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi di entitas pemerintah yang belum dilaksanakan secara baik dan optimal, sehingga hal tersebut memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan PEMDA.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Surastiani dan Handayani (2015) yang meneliti pengaruh kualitas sumberdaya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Dalam penelitian Surastiani dan Handayani (2015) di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sedangkan pada penelitian ini mencoba meneliti pada Pemerintah Daerah Kota Baubau.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kualitas**

Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
2. Apakah kualitas sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji berpengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
2. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji kualitas sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
3. Untuk memberikan bukti empiris dan menguji pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat lebih memahami pengaruh kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Serta menambah wawasan penulis dalam bidang sektor publik.
2. Bagi Pemerintah Daerah , dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik dan benar.
3. Bagi Institusi pendidikan, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi serta masukan atau pertimbangan untuk mengembangkan keilmuan akuntansi dan bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas.